

# PERUBAHAN RENSTRA

BAPPELITBANG KOTA BANDUNG

TAHUN 2018 - 2023



GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

**BAPPELITBANG**  
KOTA BANDUNG





PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Aceh No. 36 - 40117  
Telepon, (022) 4222316 Fax, (022) 4222315 BANDUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG  
NOMOR : PN/03.03/3006.1-Bappelitbang/XII/2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efektif, efisien dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung dalam mendukung Rencana Strategis Pemerintah Daerah dalam satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- f. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- n. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023;
- o. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
- q. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra

Bappelitbang merupakan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbang Tahun 2018 - 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandung

Tanggal : 7 Desember 2021

**KEPALA BAPPELITBANG**  
**ANTON SUNARWIBOWO, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690810 199703 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kita dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappelitbang Kota Bandung. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

Perubahan Rencana Strategis merupakan komitmen Bappelitbang yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandung sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kota Bandung.

Perubahan Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Bappelitbang Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023. Dengan terbitnya Perubahan Rencana Strategis Bappelitbang Kota Bandung ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Bappelitbang dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kota Bandung.

Bandung, Desember 2021

**KEPALA BAPPELITBANG  
KOTA BANDUNG,**

**ANTON SUNARWIBOWO, S.T., M.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690810 199703 1 003

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbang.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	15
2.2.2 Anggaran .....	21
2.2.3 Aset, Saran dan Prasarana .....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Bappelitbang Kota Bandung .....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang .....	30
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH... 32</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...	34
3.2.1 Tugas dan Fungsi Bappelitbang Kota Bandung yang Terkait Secara Langsung dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	44
3.2.2 Faktor – Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbang yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	46
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	48
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung .....	50

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	54
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	59
5.2 Arah Kebijakan Bappelitbang Kota Bandung .....	66
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
<b>INDIKATIF.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>97</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Data Kebutuhan dan Keadaan Sumber Daya Manusia pada Bappelitbang .....	17
Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	20
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Bappelitbang Tahun 2009 – 2020.....	22
Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappelitbang Kota Bandung sampai dengan Tahun 2020 .....	23
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 .....	28
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	33
Tabel 3.2 Fokus Pembangunan Kota Bandung .....	38
Tabel 3.3 Tema Pembangunan Kota Bandung.....	41
Tabel 3.4 Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2018 – 2023 .....	40
Tabel 3.5 Keterkaitan Visi Misi Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dan Rincian Tugas dan Fungsi Bappelitbang Kota Bandung .....	44
Tabel 3.6 Faktor–Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbang....	47
Tabel 3.7 Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung .....	51
Tabel 4.1 Perubahan Tujuan Bappelitbang Kota Bandung.....	54
Tabel 4.2 Perubahan Sasaran Bappelitbang Kota Bandung .....	55
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Setelah Reviu ....	55
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang.....	56
Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Tahun 2018 – 2023 Sebelum Perubahan .....	57
Tabel 4.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbang Hasil Reviu Tahun 2021 .....	58
Tabel 5.1 Identifikasi Faktor Eksternal, Faktor Internal dan Alternatif Strategi ...	61
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Bappelitbang Kota Bandung .....	65

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbang Kota Bandung .....	66
Tabel 6.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Bappelitbang Kota Bandung .....	70
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	98
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan .....	99

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, (2) penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, (3) penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda No. 08 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023). Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Akan tetapi seiring dengan perjalanan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 terdapat beberapa alasan yang sangat mendasar sehingga Kota Bandung harus merubah RPJMD nya. Adapun yang melatar belakangi perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024
  - Penyelarasan sasaran, Prioritas Pembangunan Daerah dengan sasaran, Prioritas Pembangunan Nasional;
  - Penyelarasan Program dan Kegiatan strategis Daerah dengan Program dan Kegiatan strategis Prioritas Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Penyesuaian struktur Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PPKD
  - Penyesuaian Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah (dan pemutakhirannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708)
4. Hasil Evaluasi RPJMD Dampak Pandemi COVID-19
  - Penyesuaian Prioritas Pembangunan
  - Penyesuaian Tema Pembangunan
  - Reformulasi target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
  - Penyesuaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
6. Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  - Penyesuaian Gambaran Umum terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Bandung
  - Penyesuaian Permasalahan dan Isu Strategis
  - Penyesuaian Program terhadap Rekomendasi KLHS
7. Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Evaluasi AKIP)
  - Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program serta indikatornya
8. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020
  - Melakukan monitoring dan evaluasi yang tepat dan terukur terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.
  - Hasil monev ini diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan dalam perencanaan selanjutnya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 30 November Tahun 2021, telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Bappelitbang sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappelitbang diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program. Dalam rangka menindaklanjuti perubahan perda RPJMD tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018-2023.

## 1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  - 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
  - 15) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
  - 16) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  - 17) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
  - 18) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18); dan
  - 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
  - 20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3).

- 21) Peraturan Walikota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Bappelitbang adalah melakukan penyesuaian terhadap arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi Bappelitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang mengacu kepada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappelitbang Tahun 2018-2023 adalah untuk:

- Menyelaraskan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappelitbang Kota Bandung tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Bappelitbang Kota Bandung 2018-2023 disusun sebagai berikut:

- **Bab 1 Pendahuluan** terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappelitbang Tahun 2018-2023 dan sistematika penulisan;
- **Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Reviu Renstra Perangkat Daerah;

- **Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;
- **Bab 4 Tujuan dan Sasaran** memuat penjabaran tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah yang hendak dicapai.
- **Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan** Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sedangkan Kebijakan yaitu arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.
- **Bab 6 : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan** memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif;
- **Bab 7 : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan** memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- **Bab 8 : Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbang**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung (Bappelitbang) Kota Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota Bandung. Pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Selanjutnya berubah kembali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengubah nama Bappeda Kota Bandung menjadi Bappelitbang Kota Bandung. Dan terakhir diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

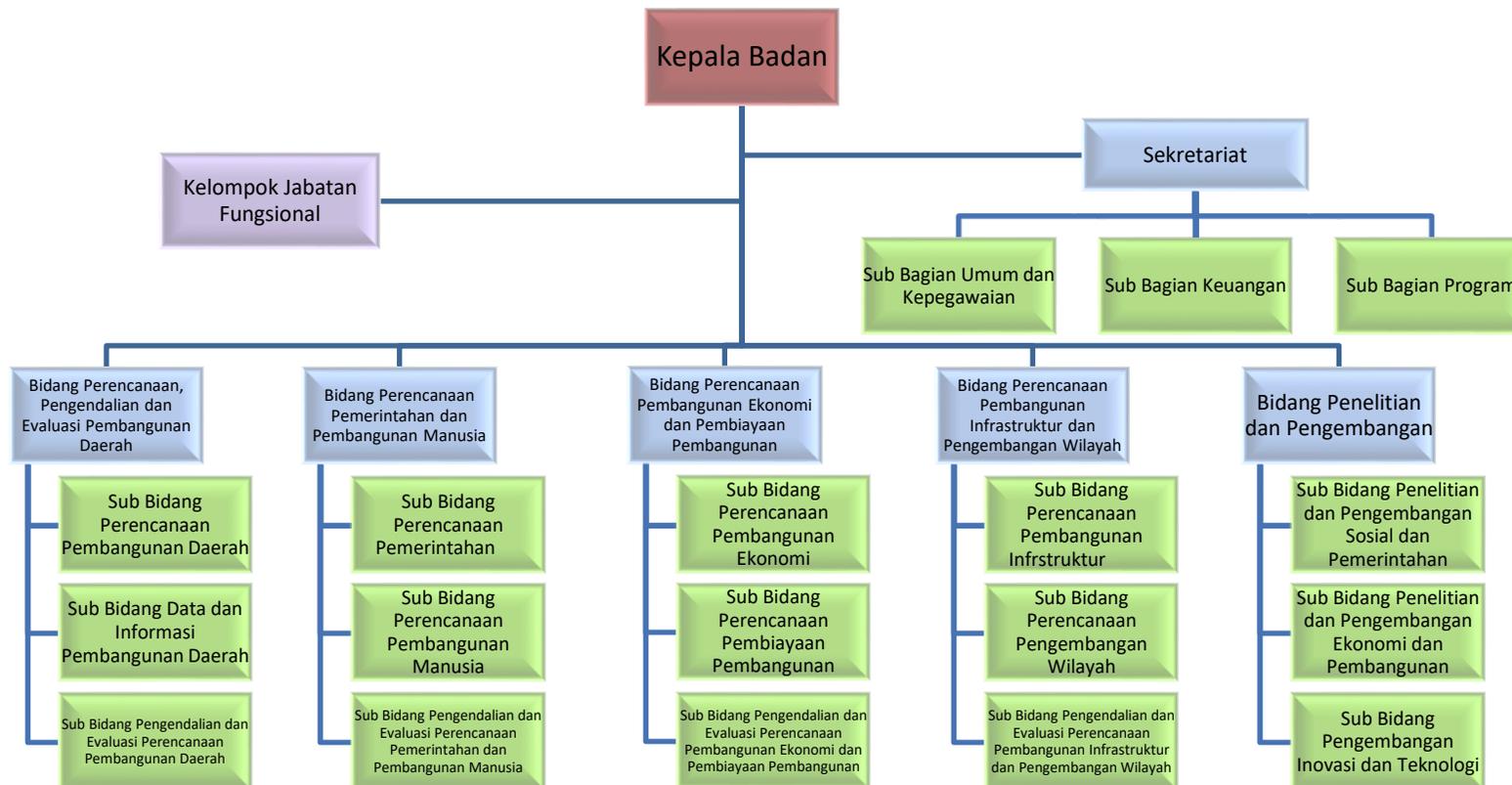
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang membawahi:
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - c. Kepala Sub Bagian Program.

3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang membawahi:
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah; dan
  - c. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang membawahi:
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
  - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia;
  - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
5. Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan, yang membawahi:
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan;
  - c. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan.
6. Kepala Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yang membawahi:
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur;
  - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah; dan
  - c. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi:
  - a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
  - b. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
8. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Bappelitbang Kota Bandung**



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappelitbang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis lingkup Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

#### A. KEPALA BADAN

Tugas pokok : Melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi : 

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. SEKRETARIAT

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program kerja, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.

- Fungsi :
1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Badan;
  2. Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Badan;
  3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
  4. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan
  5. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup kesekretariatan dan Badan; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## C. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah meliputi Perencanaan Pembangunan Daerah, data dan Informasi pembangunan Daerah serta

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan pembangunan Daerah.

- Fungsi :
1. Pengoordinasian penyusunan rancangan kebijakan teknis Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  2. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; dan;
  3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  4. Pengoordinasian pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; dan;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### D. BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi perencanaan pembangunan manusia, perencanaan pemerintahan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.

- Fungsi :
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;

3. Pengeordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
4. Pengeordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### E. BIDANG PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembiayaan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan.

- Fungsi :
1. Pengeordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  2. Pengeordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  3. Pengeordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  4. Pengeordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah meliputi perencanaan pengembangan wilayah, perencanaan pembangunan infrastruktur serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

- Fungsi :
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  3. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  4. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### G. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian

peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi.

- Fungsi :
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan;
  2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penelitian dan pengembangan;
  3. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penelitian dan pengembangan;
  4. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup penelitian dan pengembangan; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### H. SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tugas pokok : Membantu tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappelitbang Kota Bandung berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai 3 Juni 2021 berjumlah 85 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappelitbang Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Bappelitbang menjalankan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah lain. Bidang perencana di Bappelitbang bermitra dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappelitbang melalui 4 (empat) bidang perencana yaitu Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Bidang lainnya dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi *supporting* terhadap bidang perencana tersebut. Bidang Penelitian dan Pengembangan memberikan dukungan berupa penyediaan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sedangkan Sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

**Tabel 2.1**  
**Data Kebutuhan dan Keadaan Sumber Daya Manusia**  
**pada Bappelitbang Tahun 2021**

NO	JABATAN	TINGKAT JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK (MENPAN-BKN)	KELEBIHAN / KEKURANGAN
1	2	3	4	5	6
1	<b>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan</b>	II/b	1	1	-
2	<b>Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan</b>	III/a	1	1	-
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV/a	1	1	-
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV/a	1	1	-
5	Kepala Sub Bagian Program	IV/a	1	1	-
6	<b>Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	III/b	1	1	-
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	IV/a	1	1	-
8	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah	IV/a	1	1	-
9	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Daerah	IV/a	1	1	-
10	<b>Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	III/b	1	1	-
11	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia	IV/a	1	1	-
12	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan	IV/a	1	1	-
13	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintah	IV/a	1	1	-

	dan Pembangunan Manusia				
14	<b>Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan</b>	III/b	1	1	-
15	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	IV/a	1	1	-
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan	IV/a	1	1	-
17	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan	IV/a	1	1	-
18	<b>Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	III/b	1	1	-
19	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	IV/a	1	1	-
20	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah	IV/a	1	1	-
21	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	IV/a	1	1	-
22	<b>Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan</b>	III/b	1	1	-
23	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	IV/a	1	1	-
24	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	IV/a	1	1	-
25	Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	IV/a	1	1	-
26	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	JFU	10	37	27

27	Analisis Dampak Sosial	JFU	0	1	-1
28	Analisis Pemanfaatan Teknologi	JFU	1	1	0
29	Analisis Pembangunan	JFU	0	1	-1
30	Analisis Pemerintahan Daerah	JFU	0	1	-1
31	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	JFU	1	2	-1
32	Analisis Perekonomian	JFU	0	1	-1
33	Bendahara	JFU	1	1	0
34	Pengadministrasian Persuratan	JFU	0	1	-1
35	Pengadministrasian Umum	JFU	4	4	0
36	Pengelola Bahan Perencanaan	JFU	5	0	5
37	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	JFU	0	1	-1
38	Pengelola Keuangan	JFU	2	7	-5
39	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	JFU	1	1	0
40	Pengelola Program dan Kegiatan	JFU	0	1	-1
41	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JFU	1	1	0
42	Penyusun Laporan Keuangan	JFU	0	1	-1
43	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	JFU	2	2	0
44	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	JFU	0	1	-1
45	Sekretaris	JFU	1	1	0
46	Verifikator Keuangan	JFU	2	2	0
47	Perencana Madya	JFT	3	4	-1
48	Perencana Muda	JFT	12	21	-9

49	Perencana Pertama	JFT	7	12	-5
50	Peneliti	JFT	2	3	-1
51	Pranata Komputer	JFT	1	1	0
52	Arsiparis	JFT	0	2	-2
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>83</b>	<b>139</b>	<b>-53</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbang Kota Bandung (Juni 2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah pegawai pada Bappelitbang belum sesuai dengan standar kebutuhan. Tentunya hal ini menjadi salah satu catatan penting untuk dapat dilakukan pemenuhan sesuai dengan standar kebutuhan. Kecukupan sumber daya manusia yang kompeten, akan membantu memperlancar organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**Tabel 2.2**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Bappelitbang	-	1	-	-	-	-	<b>1</b>
2	Sekretariat	-	5	11	-	2	1	<b>19</b>
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,	-	4	3	-	-	-	<b>7</b>
4	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	5	3	-	-	-	<b>8</b>
5	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan	-	6	2	-	1	-	<b>9</b>
6	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	1	6	3	-	-	-	<b>10</b>

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
	dan Pengembangan Wilayah,							
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	3	2	-	1	-	6
9	Pejabat Fungsional Perencana	1	10	14	-	-	-	25
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>85</b>
<b>%</b>		<b>2,35%</b>	<b>47,06%</b>	<b>44,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,71%</b>	<b>1,18%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbang Kota Bandung (Juni 2021)

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Bappelitbang yang paling banyak adalah pendidikan S-2 sebanyak 40 orang (47,06%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Bappelitbang yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappelitbang secara umum.

Jumlah karyawan Bappelitbang yang menamatkan pendidikan S-1 cukup besar, tercatat sebanyak 38 orang atau 44,71%. Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *Think Tanknya* Pemerintah Kota Bandung, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappelitbang sebagai lembaga perencana secara optimal.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bappelitbang Kota Bandung adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari perencana dan peneliti. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kota telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional tertentu, namun belum dapat menarik minat ASN untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional tertentu.

### 2.2.2. Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappelitbang Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2009-2020 beserta serapannya sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan,**  
**Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung**

Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
36.321.383.324,55	27.657.970.877,41		-	-	33.110.743.561	24.294.100.709										

Sumber : Sub Bagian Keuangan Bappelitbang Tahun 2009 - 2020

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Bappelitbang pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 telah terjadi Pandemi *Covid-19* di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Pandemi *covid-19* ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2020, bahwa angka LPE Kota Bandung menurun sebesar -2,28. Menurunnya angka LPE Kota Bandung ini secara signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Bandung dan perubahan isu prioritas Kota Bandung. Dengan anggaran yang terbatas, maka anggaran Kota Bandung diprioritaskan kepada program pemulihan ekonomi dampak dari pandemic Covid-19. Bappelitbang sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kota Bandung telah melakukan rasionalisasi kurang lebih sebesar 35%.

Namun demikian, meskipun anggaran Bappelitbang mengalami penurunan, secara kinerja, capaiannya sebagian besar memenuhi target bahkan terdapat beberapa sasaran yang melampaui target kinerja. Target kinerja yang tidak tercapai lebih disebabkan kepada koordinasi internal Bappelitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kurang optimal.

### 2.2.3. Aset, Sarana dan Prasarana

Bappelitbang Kota Bandung menempati kantor yang bertempat di Jalan Aceh Nomor 36 sejak tahun 2016. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappelitbang Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4**

**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappelitbang Kota Bandung sampai dengan Tahun 2020**

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Kondisi Barang Rusak	Jumlah Kondisi Barang Baik
1	Kendaraan Roda 4 (Mobil)	27	12	15
2	Sepeda Roda 2 (Motor)	35	11	24
3	Sepeda Elektrik	2	0	2
4	GPS	1	0	1
5	Mesin Ketik Manual	11	7	4
6	Mesin Tik Elektronik	1	0	1
7	Lemari Besi	27	7	20
8	Rak Besi/Metal	2	1	1
9	Rak Kayu	1	0	1
10	Filling Besi/Metal	69	39	30
11	Peti Uang	1	0	1
12	Lemari Kaca	8	2	6
13	Lemari kayu	5	1	4
14	Papan Visual	2	0	2
15	Alat Penghancur Kertas	13	3	10
16	Papan Nama Instansi	3	0	3
17	White Board	3	0	3
18	Copy Board/Elektrik White Board	1	0	1
19	Peta	1	-1	2
20	Mesin Absensi	3	0	3
21	Overhead Projektor	14	4	10
22	White Board Elektronik	1	0	1
23	Lemari Kayu	33	18	15
24	Meja Kayu/Rotan	31	11	20
25	Kursi Besi/Metal	10	5	5
26	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1	0	1
27	Zice	3	1	2
28	Meja Rapat	21	3	18
29	Meja Tulis	6	2	4
30	Meja Makan	1	0	1
31	Meja Podium	1	0	1

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Kondisi Barang Rusak	Jumlah Kondisi Barang Baik
32	Meja Reseption	2	0	2
33	Meja Tambahan	1	0	1
34	Meja Bundar	2	0	2
35	Kursi Rapat	81	11	70
36	Kursi Tamu	9	5	4
37	Kursi Tangan	7	2	5
38	Kursi Putar	58	18	40
39	Kursi Biasa	15	5	10
40	Kursi Lipat	4	2	2
41	Meja Komputer	1	0	1
42	Meja Biro	2	0	2
43	Sofa	19	4	15
44	Jam Mekanis	4	0	4
45	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2	0	2
46	Alat Pendingin Unit AC	34	9	25
47	Exhaust Fan	1	0	1
48	Kompor Gas	1	0	1
49	Oven Listrik	1	0	1
50	Televisi	67	7	60
51	Cassette Recorder	1	0	1
52	Amplifier	1	0	1
53	Loudspeaker	5	0	5
54	Wireless	2	0	2
55	Microphone Floor Stand	2	0	2
56	Mic Conference	2	0	2
57	Unit Power Supply	34	14	20
58	Stabilisator	5	2	3
59	Camera Video	2	0	2
60	Camera Film	2	0	2
61	Dispenser	5	0	5
62	Alat Pemadam Kebakaran	5	0	5
63	P.C Unit/ Komputer PC	170	50	120
64	Laptop	48	28	20
65	Note Book	105	55	50
66	Personal Komputer Lain-lain	57	17	40
67	Printer	126	51	75
68	Plotter	2	0	2
69	Viewer	4	0	4
70	Scanner	8	2	6
71	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	23	3	20

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Kondisi Barang Rusak	Jumlah Kondisi Barang Baik
72	Server	6	0	6
73	Router	10	0	10
74	Modem	3	0	3
75	Camera + Attachment	25	5	20
76	Proyektor + Attachment	26	6	20
77	Equalizer	1	0	1
78	Microphone/Wireless Mic	3	0	3
79	Power Amplifier	1	0	1
80	Microphone Table stand	3	0	3
81	Camera Electronic	6	0	6
82	Telephone (PABX)	1	0	1
83	Pesawat Telephone	2	0	2
84	Handy Talky	13	3	10
85	Facsimile	3	0	3
86	Handphone	10	6	4
87	Handphone	24	3	21
	<b>Jumlah</b>	<b>1.395</b>	<b>434</b>	<b>961</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbang Kota Bandung (Juni 2021)

Lokasi Kantor Bappelitbang yang cukup strategis berada di Lingkungan Balai Kota Bandung memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappelitbang sehingga memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dan lainnya) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi aset (barang dan kendaraan) serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Bappelitbang.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbang Kota Bandung

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappelitbang Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui aplikasi e-musrenbang, SIPD maupun secara langsung;
2. Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD hasil Reses melalui aplikasi E-Musrenbang dan SIPD;
3. Sinkronisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dengan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bandung;
4. Pengukuran perencanaan kinerja Perangkat Daerah;
5. Pengukuran pelaksanaan perencanaan kinerja daerah serta Perangkat Daerah secara berkala;
6. Pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
7. Pelayanan informasi penelitian dan pengembangan melalui aplikasi e-litbang dan secara langsung;
8. Pelayanan informasi perencanaan tata ruang wilayah Kota Bandung melalui Bandung Planning Gallery.
9. Pelayanan Kesekretariatan meliputi pelayanan Administrasi Umum, Kearsipan, Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Badan.

Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan sebagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

- 1) Dokumen Rancangan Kebijakan RPJPD, RPJMD, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah;
- 2) Dokumen Data Pembangunan Daerah guna menunjang perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung;
- 3) Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi daerah serta Perangkat Daerah;
- 4) Dokumen-dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan di Kota Bandung yang meliputi dokumen kajian bidang ekonomi, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang infrastruktur dan

pengembangan wilayah.

Dokumen-dokumen tersebut disusun setiap 25 tahun, 5 tahun dan setiap tahun dan kemudian disosialisasikan kepada seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) pembangunan di Kota Bandung. Semua dokumen perencanaan pembangunan tersebut menjadi pedoman oleh seluruh Perangkat Daerah ataupun stakeholders lainnya dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya maupun dalam melaksanakan pembangunan.

Fungsi lain dari Bappelitbang Kota Bandung adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappelitbang Kota Bandung menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang Kota Bandung merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 2.5

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bappeda Tahun ke-(%)					Realisasi Capaian Tahun ke-(%)					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>A. Sebelum Perubahan</b>																			
1.	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	-	-	-	25,57 Poin	25,73 Poin	25,89 Poin	26,05 Poin	26,21 Poin	25,57 Poin	25,35 Poin	-	-	-	100 %	98,52 %	-	-	-
2.	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	-	-	-	20,01 Poin	20,06 Poin	20,11 Poin	20,16 Poin	20,21 Poin	20,01 Poin	18,48 Poin	-	-	-	100 %	92,12 %	-	-	-
3.	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	-	-	-	72 %	76 %	80 %	84 %	72 %	88 %	76,47 %	-	-	-	122,2 %	100,6 %	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bappeda Tahun ke-(%)					Realisasi Capaian Tahun ke-(%)					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	78,17 Poin	78,42 Poin	78,67 Poin	78,92 Poin	79,17 Poin	79,72 poin	84,41 poin	-	-	-	101,3 %	107,6 %	-	-	-

Sumber : LAKIP Bappelitbang Tahun 2019-2020

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang

Sesuai dengan capaian kinerja dan serapan anggaran yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung tahun 2019-2020, maka terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Bappelitbang Kota Bandung dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Tantangan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
2. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan;
3. Hasil musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karena tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah serta masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing OPD;
4. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, sehingga usulan kegiatan dari daerah kepada Pemerintah tidak mendapatkan respon jelas yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi perencanaan di pusat dan daerah;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat OPD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya;
6. Pemahaman Perangkat Daerah terkait penyusunan dokumen kelitbang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah belum optimal;
7. Penerapan hasil kelitbang oleh perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai rekomendasi hasil kajian kelitbang.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappelitbang Kota Bandung dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu pengakuan kepada Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten Kota dengan Provinsi;
3. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
4. Komitmen Perangkat Daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain;
5. Terdapat kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian;
6. Kemudahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui aplikasi E-SAKIP maupun aplikasi perencanaan dari pemerintah pusat (KRISNA dan lain sebagainya);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sehingga memudahkan untuk melaksanakan tata kelola kelitbangan daerah.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023, secara umum pembangunan Kota Bandung diarahkan untuk mengatasi permasalahan pokok, yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial; (2) masih belum optimalnya kualitas sumber daya manusia; (3) masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur; (4) pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan; (5) meningkatnya rendahnya kualitas lingkungan; dan (6) masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbang Kota Bandung, permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu perencanaan dan litbang. Dalam urusan perencanaan, terdapat dua permasalahan pokok, yaitu terkait dengan sinkronisasi dan koordinasi proses perencanaan daerah dan kesenjangan capaian sasaran pembangunan dengan rencana serta belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan daerah, masih terdapat perbedaan data yang dihasilkan, dan perbedaan waktu antara penyediaan dan kebutuhan data dalam perencanaan. Sementara itu, dalam urusan Kelitbangan, permasalahan utama yang dihadapi adalah hasil riset atau kajian belum sepenuhnya menjadi dasar penyusunan strategi pemerintahan. Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappelitbang Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada Tabel 3-1 berikut.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
<b>Urusan Perencanaan</b>			
1	<b>Belum optimalnya Perencanaan kinerja Pembangunan Daerah</b>	1. Cascading kinerja RPJMD pada Renstra perangkat daerah kurang optimal 2. Indikator perencanaan kinerja Perangkat Daerah belum seluruhnya memiliki kriteria "SMART" 3. Instrument pengukuran kinerja Perangkat Daerah belum dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengukuran capaian kinerja (organisasi dan individu)	1. Sebagian aparaturnya Bappelitbang belum optimal memahami kerangka logis kinerja/cascading kinerja RPJMD 2. Pemanfaatan instrumen pengukuran kinerja dan data kinerja dalam perencanaan strategis belum optimal
2	<b>Kesenjangan capaian sasaran pembangunan dengan Rencana</b>	1. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan 2. Rekomendasi perbaikan kinerja berkala tidak optimal 3. Capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah tidak optimal	1. sebagian aparaturnya Bappelitbang belum optimal memahami evaluasi dan analisis kinerja 2. Perangkat Daerah belum optimal menindaklanjuti rekomendasi perbaikan kinerja
<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>			
3	<b>Hasil riset atau kajian belum sepenuhnya menjadi pijakan strategi pemerintahan</b>	Penerapan hasil kelitbangan oleh Perangkat Daerah belum sepenuhnya sesuai rekomendasi	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil kelitbangan yang direkomendasikan kepada Perangkat Daerah belum optimal 2. Pemahaman Perangkat Daerah terkait penyusunan dokumen kelitbangan sesuai Permendagri 17 Tahun 2016 belum optimal

Sumber : Risk Register Bappelitbang Tahun 2021

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kota Bandung tahun 2018- 2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG  
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan Sumber Daya Manusia Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali

dengan ruang - ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

**Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga, dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil, dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, disusun Misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan

misi ini adalah ***Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung.*** Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

**1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

**2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih**

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

**3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

**4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

**5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi**

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Pembangunan Kota Bandung yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 serta 3 (tiga) tahun sisa periode RPJMD sampai dengan tahun 2023 diarahkan pada beberapa fokus pembangunan. Fokus tahunan pembangunan tersebut diharapkan dapat menjawab isu strategis pembangunan dan mempercepat pencapaian target sasaran pembangunan.

Adapun fokus pembangunan per tahun selama 5 (lima) tahun digambarkan sebagaimana pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Fokus Pembangunan Kota Bandung**

<b>FOKUS PEMBANGUNAN</b>				
<b>TAHUN I (2019)</b>	<b>TAHUN II (2020)</b>	<b>TAHUN III (2021)</b>	<b>TAHUN IV (2022)</b>	<b>TAHUN V (2023)</b>
1. Ketenteraman dan Kenyaman	1. Pendidikan	1. Pendidikan	1. Pendidikan	1. Pendidikan
2. Pendidikan	2. Kesehatan	2. Kesehatan	2. Kesehatan	2. Kesehatan
3. Kesehatan	3. Tata Kelola Pemerintahan	3. Tata Kelola Pemerintahan	3. Peningkatan Perekonomian	3. Peningkatan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan	4. Peningkatan Perekonomian	4. Peningkatan Perekonomian	4. Pengangguran	4. Pengangguran
5. Peningkatan Perekonomian	5. Pengangguran	5. Pengangguran	5. Kemiskinan	5. Kemiskinan
6. Pengangguran	6. Kemiskinan	6. Kemiskinan	6. RTH	6. RTH
7. Kemiskinan	7. RTH	7. RTH	7. Banjir	7. Banjir
8. RTH	8. Banjir	8. Banjir	8. Macet	8. Macet
9. Banjir	9. Macet	9. Macet	9. Kawasan Kumuh	9. Kawasan Kumuh
10. Macet	10. Kawasan Kumuh	10. Kawasan Kumuh	10. Sampah	10. Sampah
11. Kawasan Kumuh	11. Sampah	11. Sampah	11. Kualitas Lingkungan Hidup	11. Kualitas Lingkungan Hidup
12. Sampah	12. Kualitas Lingkungan Hidup	12. Kualitas Lingkungan Hidup	12. Pembiayaan Pembangunan	12. Pembiayaan Pembangunan
13. Kualitas Lingkungan Hidup	13. Pembiayaan Pembangunan	13. Pembiayaan Pembangunan		
14. Pembiayaan Pembangunan				

Berdasarkan fokus pembangunan tahunan di atas, maka tema pembangunan tahunan Pemerintah Kota Bandung selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2019 sampai dengan 2023 disajikan pada tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Tema Pembangunan Kota Bandung**

TAHUN	RPJMD	PERUBAHAN RPJMD
2019	Mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2020	Meningkatkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2021	Memantapkan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian kota menuju Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis	Percepatan Pemulihan Ekonomi, Dampak Sosial dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah.
2022	Memantapkan kualitas pelayanan dasar, peningkatan perekonomian kota dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan menuju Kota Bandung yang nyaman, sejahtera dan berdaya saing	Meningkatkan ketahanan kota, mempercepat pemulihan ekonomi, dan reformasi sosial menuju Kota Bandung yang nyaman, sejahtera, dan berdaya saing.
2023	Memantapkan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian kota menuju Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis	Memantapkan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian kota menuju Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis.

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023

Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas Pendidikan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
4. Peningkatan perekonomian kota
5. Tata kelola pemerintahan
6. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
7. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tersebut di atas merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2018- 2023. Terdapat 25 janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjadi program prioritas Kepala Daerah dan tercantum dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2018-2023**

NO	JANJI WALI KOTA	PROGRAM	INDIKATOR JANJI WALI KOTA	SATUAN	TARGET			TARGET AKHIR RPJMD
					2021	2022	2023	
1	<b>PIPPK Plus</b>	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Persentase pemanfaatan atas alokasi anggaran	Persen	100	100	100	100
2	<b>Satu Pusat Kreativitas Pemuda Per Wilayah</b>	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pusat Kreativitas Pemuda Aktif	Lokasi	1	1	1	6
3	<b>Youthspace per Kecamatan</b>	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Youthspace Aktif	Lokasi	7	11	10	<b>30</b>
4	<b>Satu Perpustakaan Keliling Per Kecamatan</b>	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan keliling Aktif	Unit	1	-	1	6
5	<b>Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru dan ASN Berprestasi</b>							
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru (ASN) berprestasi sesuai dengan kriteria	orang	150	150	150	450
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase siswa SD dan SMP mendapatkan beasiswa	Persen	100	100	100	100
		Program Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN berprestasi sesuai dengan kriteria	Orang	15	15	15	78
6	<b>Pusat Pelayanan &amp; Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan</b>	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan	Unit	27	41	38	151
7	<b>Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak per Kelurahan</b>	Program Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak	Unit	16	16	15	151

8	<b>Kampung Wisata di Setiap Wilayah</b>	1. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kampung Wisata terbentuk	Lokasi	2	2	2	9
9	<b>Flyover/ underpass</b>	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Bantuan APBD Provinsi/ APBN	Jumlah Flyover/ Underpass Terbangun	Unit	1	1	1	5
10	<b>Kolam/saluran retensi</b>	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Kolam/ saluran retensi Terbangun	Kolam	1	1	1	7
11	<b>Fasilitas Disabilitas di semua Ruang Publik</b>							
		Program Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang ada Fasilitas Disabilitas	Ruas Jalan	9	10	10	72
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Taman yang ada Fasilitas Disabilitas	Taman	10	10	10	42
12	<b>25.000 Sambungan Air Bersih Baru</b>	Program Kawasan Permukiman	Jumlah Sambungan Air Bersih Baru yang tersambung	SR	1500	5000	7999	25.000
13	<b>Rehabilitasi Sarana Olahraga per Kecamatan</b>	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Sarana Olahraga Kecamatan yang Terehabilitasi	Kecamatan	12	10	6	30
14	<b>Bank Sampah per Kecamatan</b>	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank Sampah per Kecamatan	Kecamatan	-	-	-	30
15	<b>Rehabilitasi Pasar Tradisional</b>	-	Jumlah Pasar Tradisional Terehabilitasi	Unit	2	2	2	10

16	<b>Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working Space, CWS) per Kecamatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</li> <li>2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> </ol>	Jumlah Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working Space, CWS) Aktif	Unit	7	5	5	30
17	<b>UMK untuk Guru Honoror</b>	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Honoror berprestasi sesuai UMK	Persen	100	100	100	100
18	<b>Gratis Biaya Pemakaman bagi Warga Tidak Mampu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li> <li>- Program Pengembangan Permukiman</li> </ul>	Jumlah Warga Tidak Mampu yang mendapat layanan pemakaman gratis	orang	400	400	400	2000
19	<b>Insentif RT dan RW</b>	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah RT dan RW yang mendapatkan Insentif	RW	1591	1591	1591	1591
				RT	9897	9897	9897	9897
20	<b>Subsidi Harga Sembako</b>	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Sembako yang disubsidi	RTS	50.000	-	-	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Beras untuk Subsidi Sembako yang tersalurkan	Ton	100	100	100	500
21	<b>Kartu Bandung Sejahtera (KBS)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kawasan Permukiman</li> <li>2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> </ol>	-		-	-	-	
22	<b>Menciptakan 1 Koperasi Juara Setiap Kecamatan</b>	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Juara	Koperasi per Kecamatan	10	2	2	30

<b>23</b>	<b>Satu (1) Koperasi di Tempat Ibadah di Setiap Kecamatan</b>	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi di Tempat Ibadah	Koperasi per Kecamatan	6	2	2	30
<b>24</b>	<b>Insentif untuk Guru Ngaji (Keagamaan)</b>	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Guru Ngaji yang diberi insentif	Orang	11.733	11.733	11.733	11.733
<b>25</b>	<b>Gratis Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah</b>	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Tanah Tempat Ibadah bersertifikat	Sertifikat	verifikasi dan pengajuan sertifikat	verifikasi dan pengajuan sertifikat	pengajuan sertifikat	500
<b>26</b>	<b>Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah</b>	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah Rutin	Gerakan	-	8	8	8

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023

### 3.2.1 Tugas dan Fungsi Bappelitbang Kota Bandung yang Terkait Secara Langsung dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbang Kota Bandung merupakan unit organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yaitu untuk urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, tugas Bappelitbang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian serta pengembangan, dimana hal tersebut terkait langsung dengan pencapaian Misi ke-2 Wali Kota Bandung dalam “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih**”. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Keterkaitan Visi Misi Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dan Rincian Tugas dan Fungsi Bappelitbang Kota Bandung**

<b>Visi :</b> “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Agamis”				
<b>Misi :</b> “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih”				
<b>Tujuan/Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Program Pemerintah Daerah</b>	<b>Urusan/Tugas/Fungsi Bappelitbang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai AKIP	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Urusan: 1. Penunjang Pemerintah: Perencanaaa, penelitian dan pengembangan
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tugas: menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah fungsi penunjang
			Program Penelitian dan	Perencanaan Pembangunan,

<b>Visi : “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Agamis”</b>				
<b>Misi : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih”</b>				
<b>Tujuan/Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Program Pemerintah Daerah</b>	<b>Urusan/Tugas/Fungsi Bappelitbang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Fungsi : 1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; 3. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sumber : Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Perwal No 13 Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa terkait dengan Visi Misi Wali Kota Bandung Tahun 2018-2023, tugas dan fungsi Bappelitbang adalah mendukung pelaksanaan misi ke-2 yaitu ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih*** yang memiliki tujuan berupa ***“Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien”***. Tujuan tersebut diukur dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan target nilai BB. Adapun tujuan Pemerintah Daerah tersebut memiliki 1 sasaran yaitu: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan 5 indikator sasaran yaitu :

- 1) Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"
- 2) Nilai AKIP
- 3) Opini BPK
- 4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 5) Nilai EPPD

Pencapaian indikator sasaran berupa Nilai AKIP diimplementasikan dengan pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sedangkan pencapaian indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik" diimplementasikan dengan pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dukungan Bappelitbang Kota Bandung adalah dengan menyelaraskan sasaran strategis, program dan kegiatan perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran dan program pemerintah daerah yang tertuang di dalam RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023.

### **3.2.2 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbang yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappelitbang untuk mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan oleh Bappelitbang Kota Bandung, terdapat adanya faktor penghambat dan pendorong sebagai sebagai berikut:

Tabel 3.6

**Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbang**

No	Faktor-Faktor Penghambat	Faktor-Faktor Pendorong
1	2	3
<b>Urusan perencanaan</b>		
1	Sebagian aparaturnya Bappelitbang belum optimal memahami kerangka logis kinerja/cascading kinerja RPJMD	Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan Integrasi Sistem Perencanaan Kinerja, Sistem Penganggaran dan Informasi Kinerja ( <i>Performance Based Budgeting</i> ) dalam satu aplikasi terintegrasi untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran
2	Pemanfaatan instrumen pengukuran kinerja dan data kinerja dalam perencanaan strategis belum optimal	Pemerintah Kota Bandung telah membangun Sistem Penilaian Kinerja Individu yang diselaraskan dengan ukuran kinerja organisasi, untuk memastikan setiap individu memiliki manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi
3	Sebagian aparaturnya Bappelitbang belum optimal memahami evaluasi dan analisis kinerja	Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Metode Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, untuk memastikan Validitas Data Kinerja
4	Perangkat Daerah belum optimal menindaklanjuti rekomendasi perbaikan kinerja	
<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>		
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil kelitbangan yang direkomendasikan kepada Perangkat Daerah belum optimal	Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tata Kelola kelitbangan
6	Pemahaman Perangkat Daerah terkait penyusunan dokumen kelitbangan sesuai Permendagri 17 tahun 2016 belum optimal	

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:

- a. Mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur;
- b. Membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing – masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;
- c. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
- d. Menyeraskan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

- a. Memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
- b. Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan
- c. Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan sistem transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

- a. Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:

- a. Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. Mempertahankan hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

- e. Mempertahankan fungsi dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. Melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan;
- g. Meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan yang akan dijalankan dapat diarahkan. Kebijakan struktur ruang kota adalah untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

**Isu Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung**

No	Aspek	Isu Strategis
1.	Kualitas Perencanaan,	1. Kinerja RPJMD belum sepenuhnya dikawal oleh perangkat daerah pengampu kinerja. Hal tersebut menjadikan program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat
		2. Perumusan indikator kinerja pada beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai dengan level jabatannya, berorientasi hasil/outcome dan dapat mengawal kinerja pemerintah daerah;
		3. Kerangka logis yang dibangun untuk mencapai kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya menggambarkan strategi yang komprehensif dalam mewujudkan kinerja pemerintah daerah dan menyelesaikan permasalahan atau isu strategis daerah
2.	Sistem Pengelolaan Data dan Informasi	1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan
		2. Aplikasi sistem manajemen perencanaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem penganggaran, evaluasi dan remunerasi kinerja;
3.	Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah belum optimal
4.	Penelitian dan Pengembangan	Hasil Penelitian dan Pengembangan belum sepenuhnya menjadi pijakan strategi pemerintahan
5.	Sumber daya manusia dan Standar Pelayanan	1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
		2. Nilai IKM Bappelitbang masih di bawah standar minimal pelayanan Perangkat Daerah dengan kategori baik (berdasarkan RPJMD Perubahan minimal 85)

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Bandung, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Bandung yaitu: Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman Sejahtera dan Agamis sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung dimana Bappelitbang termasuk Perangkat Daerah yang mengalami perubahan SOTK, Tupoksi dan urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Bappelitbang. Seiring dengan hal itu maka Renstra yang telah ada saat ini memerlukan Reviu terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappelitbang menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan indikator kinerjanya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota. Untuk menjadikan Bappelitbang yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta menjadi *think thank* nya pembangunan di Kota Bandung.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan indikator kinerja Bappelitbang adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera sebagai visi, harus menjadi acuan dan pedoman, tidak saja bagi Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya akan tetapi menjadi semangat bagi seluruh

warga kota dalam membangun kotanya;

- Pemenuhan janji walikota dan wakil walikota terpilih, yaitu: (1) Bandung Unggul, (2) Bandung Nyaman, (3) Bandung Sejahtera, dan (4) Bandung Agamis
- Pencapaian 25 Janji Walikota untuk Bandung.
- Bappelitbang sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappelitbang sebagai lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan agen utama perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

Sebagaimana Visi dan Misi Wali Kota Bandung yang tertuang pada RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023, Bappelitbang memiliki fungsi utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kota Bandung merupakan perwujudan misi yang ke-2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator berupa Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung, Nilai LPPD Kota Bandung, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung. Dari seluruh indikator tersebut, Bappelitbang memiliki peran untuk mewujudkan pencapaian target indikator sasaran Nilai IKM dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung untuk komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam kaitannya dengan Bappelitbang sebagai lembaga perencana, penelitian dan pengembangan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- (1) Berkualitas artinya dalam penyusunan dokumen perencanaan, dilakukan melalui pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, politik menggunakan metode ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Aspiratif artinya dalam penyusunan dokumen perencanaan, keterlibatan

para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan dan kelitbangan menjadi suatu keniscayaan.

- (3) Aplikatif artinya produk perencanaan dan penelitian dan pengembangan dengan mudah dapat dijadikan sebagai salah satu dasar perumusan kebijakan di Kota Bandung.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sebagai lembaga mandiri, profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Pemantapan fungsi dan peran perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ke depan harus melalui upaya-upaya yang lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**Tabel 4.1**

**Perubahan Tujuan Bappelitbang Kota Bandung**

TUJUAN (2018-2023)	TUJUAN (Hasil Reviu : 2021 s.d 2023 )
1. Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
2. Meningkatnya kinerja Pelayanan Bappelitbang	

Demikian pula dengan kerangka sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbang, kerangka sasaran pada tahun 2018 s.d 2020 tidak digunakan pada kerangka sasaran 2021 s.d 2023.

**Tabel 4.2**  
**Perubahan Sasaran Bappelitbang Kota Bandung**

<b>SASARAN (2018-2023)</b>	<b>SASARAN (Hasil Reviu : 2021 s.d 2023 )</b>
1. Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan	1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
3. Meningkatnya pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah	
4. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas

Secara ringkas, kerangka logis tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbang Kota Bandung setelah dilakukan Reviu oleh Tim yaitu mempunyai 2 tujuan dan 2 sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Setelah Reviu**

<b>MISI KOTA BANDUNG</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah
		2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas

Untuk mencapai target kedua sasaran tersebut maka berdasarkan RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023, indikator kinerja sasaran yang semula ada 5 indikator kinerja sasaran, menjadi 2 indikator kinerja sasaran yang semuanya dijadikan indikator kinerja utama (IKU) Bappelitbang. Maka berdasarkan Renstra Bappelitbang Tahun 2018-2023 periode 2018 s.d 2020, dapat diuraikan perubahan indikator kinerja sasaran sebagai berikut

**Tabel 4.4****Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Setelah Reviu**

<b>INDIKATOR KINERJA (periode Tahun 2018-2020)</b>	<b>Ket</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (Hasil Reviu Tahun 2021)</b>	<b>Ket</b>
1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	<b>IKU</b>	1. Nilai AKIP Kota Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	<b>IKU</b>
2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	<b>IKU</b>		
3. Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	<b>IKU</b>	2. Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan	<b>IKU</b>
4. Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan	<b>IKU</b>	3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik	<b>IKU</b>
5. Indeks Kepuasan Masyarakat	<b>IKU</b>		

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat perubahan kerangka target pencapaian indikator sasaran jangka menengah dari awal penyusunan Renstra hingga reviu tahun ini, diuraikan pada tabel 4.6, tabel 4.7 dan tabel 4.8, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Tahun 2018-2023 Sebelum Perubahan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2018	TARGET KINERJA SASARAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih	Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	25,41 Poin	25,57 Poin	25,73 Poin	25,89 Poin	26,05 Poin	26,21 Poin
			Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	19,96 Poin	20,01 Poin	20,06 Poin	20,11 Poin	20,16 Poin	20,21 Poin
		Meningkatnya pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	75 %	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,92 Poin	78,17 Poin	78,42 Poin	78,67 Poin	78,92 Poin	79,17 Poin

Tabel 4.6

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbang Hasil Reviu Tahun 2021

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2018	TARGET KINERJA SASARAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	45,37 Poin	45,58 Poin	45,79 Poin	44,05 Poin	44,12 Poin	44,20 Poin
			Persentase Hasil Kajian yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	-	-	-	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik	77,92 Poin	78,17 Poin	78,42 Poin	83,00 Poin	84,00 Poin	85,00 Poin

## **BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

#### **- Faktor Internal**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

##### **1. Aspek Kekuatan**

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappelitbang yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappelitbang

##### **2. Aspek Kelemahan**

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappelitbang yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappelitbang.

#### **- Faktor Eksternal**

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappelitbang yaitu :

##### **1. Aspek Peluang**

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappelitbang.

##### **2. Aspek Ancaman**

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappelitbang di Kota Bandung.

## A. STRATEGI

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappelitbang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappelitbang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappelitbang yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bandung secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. *Strengts - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengts - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Identifikasi Faktor Eksternal, Faktor Internal, dan Alternatif Strategi**

<p><b>Faktor Eksternal</b></p> <p><b>Faktor Internal</b></p>	<p><b>Peluang (O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Bandung sebagai pusat Perguruan Tinggi, dan Penelitian yang berkualitas</li> <li>3. Participatory planning semakin optimal;</li> <li>4. Pesatnya perkembangan Kota Bandung di berbagai sektor pembangunan;</li> <li>5. Memiliki acuan dalam penyusunan rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan anggaran dari Provinsi</li> <li>6. Pesatnya perkembangan dunia usaha/swasta</li> <li>7. Adanya kawasan MEA yang memicu pertumbuhan investasi</li> <li>8. Adanya pergeseran paradigma dalam perencanaan dan pengembangan kota yang awalnya hanya meliputi perencanaan fisik menjadi perencanaan yang didasarkan pada <i>sustainable development (konsep smart city)</i></li> <li>9. Perkembangan ilmu dan teknologi</li> </ol>	<p><b>Ancaman (T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan;</li> <li>2. Perencanaan masih bersifat Sektoral;</li> <li>3. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan SKPD lain</li> <li>4. Tingginya urbanisasi penduduk pendatang;</li> <li>5. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;</li> <li>6. Adanya regulasi yang membatasi kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>7. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan</li> <li>8. Tuntutan representasi dalam proses rencana pembangunan semakin kuat</li> <li>9. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil.</li> <li>10. Kebijakan yang terlalu seragam akan mengesampingkan kekhasan karakteristik masyarakat Kota Bandung</li> <li>11. Masyarakat kreatif memiliki <i>road map</i>nya sendiri</li> <li>12. Adanya wabah pandemi Covid-19 yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi</li> </ol>
--	---	---

<p><b>Kekuatan (S) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan dan peran Bappelitbang dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibidang perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan serta penelitian dan pengembangan;</li> <li>2. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbang dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai</li> <li>3. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;</li> <li>4. Ketersediaan JFT perencana dan peneliti;</li> <li>5. Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah</li> <li>6. Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasi sesuai Perpres 54 nomor 10 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>7. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan;</li> <li>8. Lokasi kantor cukup strategis;</li> <li>9. Kendaraan operasional dalam jumlah dan kondisi yang memadai;</li> <li>10. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Bappelitbang dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan (S1 – S3 : O1 - O3)</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan (S3,S4 : O6)</li> <li>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi lebih lancar (S6 : O8)</li> <li>4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bappelitbang (S4, S5, S10, S12 : O1,O3)</li> <li>5. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam percepatan Bandung sebagai kota Metropolitan (S5, S6,S12 : O4)</li> <li>6. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral (S1-S3 : T2).</li> <li>2. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan (S1-S3 : T1)</li> <li>3. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan (S2-S4 : T3)</li> <li>4. Mengoptimalkan peranan Bappelitbang dalam perencanaan, evaluasi dan pengendalian penganggaran (S5, S6, S12 : T1)</li> <li>5. Mengoptimalkan kendaraan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan perencanaan pembangunan (S8,S9;T1)</li> <li>6. Menerapkan perundang-undangan yang ada untuk perumusan SPM perencanaan (S4, S14, S15 : T1)</li> <li>7. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan (S3 : T1, T7)</li> <li>8. Meningkatkan Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi tuntutan</li> </ol>
--	--	---

<p>11. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas.</p> <p>12. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana;</p> <p>13. Bappelitbang menjadi salah satu anggota TAPD;</p> <p>14. Sistem Informasi e-Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah dibangun dan dikembangkan.</p> <p>15. Pengembangan aplikasi E-SAKIP untuk mengintegrasikan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja</p> <p>16. adanya sistem e-litbang yang merupakan wadah dalam menjaring berbagai inovasi baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah dalam mendukung kegiatan kelitbangan</p> <p>17. telah diterapkannya sistem remunerasi pegawai sehingga memotivasi ASN dalam meningkatkan produktivitas kerjanya.</p>	<p>pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha (S13 : O2, O7, O8)</p> <p>7. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan (S16 : O7,O8)</p>	<p>masyarakat yang ingin 'instan' terhadap hasil pembangunan (S6, S11,S12 : T3)</p> <p>9. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya penetapan SPM yang belum terbentuk (S13 : T6)</p> <p>10. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW ( S15 : T2,T3 )</p> <p>11. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya. (S2-S4 : T4)</p>
<p><b>Kelemahan (W):</b></p> <p>1. Komposisi ASN baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum sesuai dengan kebutuhan Bappelitbang</p>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O) :</b></p> <p>1. Mengembangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi</p>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T) :</b></p> <p>1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur</li> <li>3. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa;</li> <li>4. Manajemen jabatan fungsional belum optimal</li> <li>5. Penggunaan &amp; perawatan kendaraan operasional belum optimal.;</li> <li>6. Barang inventaris belum terkelola secara baik;</li> <li>7. Tidak adanya tempat/ruangan khusus penyimpanan barang inventaris kantor;</li> <li>8. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris kantor;</li> <li>9. Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan;</li> <li>10. Sering terjadi reduksi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada saat proses penganggaran</li> <li>11. Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan;</li> <li>12. Masih rendahnya hasil litbang yang dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah;</li> </ol>	<p>Bappelitbang dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur bappelitbang yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa.(W2,W3 : O6 )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian (W2, W3 : O6)</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan (W7-W14 : O1)</li> <li>4. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada (W4, W5 : O3)</li> <li>5. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Bandung (W 20 : O6,O7)</li> <li>6. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti (W4, W5 : O3)</li> <li>7. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk-produk perencanaan (W18,W21 : O5-O8)</li> </ol>	<p>tuntutan masyarakat dalam pembangunan (W2,W3 : T5)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menerapkan 'merit system' dalam pemberdayaan SDM untuk mengurangi standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W1,W4,W5)</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untuk menerapkan standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W7,W8, W13)</li> <li>4. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (W15 : T2)</li> </ol>
--	---	---

Berdasarkan tabel di atas dapat dipetakan strategi untuk memenuhi pencapaian target dari 3 indikator kinerja utama (IKU) Bappelitbang.

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Bappelitbang Kota Bandung**

<b>Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis</b>				
<b>Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih</b>				
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensinergikan antara perencanaan Sektorial dengan RPJP, RPJM dan RTRW.</li> <li>- Merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan, serta memberikan pemahaman kepada OPD lain terkait perencanaan.</li> <li>- Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral</li> </ul>
			Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Bandung</li> <li>- Mengembangkan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian</li> </ul>
		Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan Bappelitbang</li> </ul>

## 5.2. Arah Kebijakan Bappelitbang Kota Bandung

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023, maka Bappelitbang menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbang Kota Bandung**

<b>Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis</b>					
<b>Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih</b>					
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Kota Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	1. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW  2. Merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan, serta memberikan pemahaman kepada OPD lain terkait perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta terkait sinergitas program pembangunan</li> <li>• Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang</li> <li>• Pelibatan unsur lembaga pendidikan agar berkontribusi dalam peningkatan kualitas perencanaan</li> <li>• Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD</li> <li>• Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan</li> </ul>

<b>Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis</b>					
<b>Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih</b>					
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
				3. Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral	Peningkatan skill dan kompetensi perencana melalui pendidikan dan pelatihan
				4. Mengoptimalkan peranan Bappelitbang dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial</li> </ul>
				5. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta dan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan daerah</li> <li>• Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan</li> </ul>
			Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan	1. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan implementasi kajian dengan melibatkan unsur perguruan tinggi dan stakeholder terkait</li> <li>• Membuka Forum kelitbang guna menjangkau masukan, ide serta inovasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan</li> </ul>
				2. Mengembangkan sumber daya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai	Meningkatkan kualitas SDM peneliti

<b>Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis</b>					
<b>Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih</b>					
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
				perguruan tinggi dan lembaga penelitian	
				3. Pemanfaatan teknologi dan informasi	Menyusun grand design Tata Kelola Kelitbangan
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik	Meningkatkan kualitas pelayanan Bappelitbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas SDM Pelayanan Bappelitbang;</li> <li>• Meningkatkan sarana prasarana pelayanan Bappelitbang</li> <li>• Meningkatkan Tata Kelola pelayanan Bappelitbang</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Jumlah program dan kegiatan di lingkup Bappelitbang pada akhir tahun perencanaan periode 2018-2023 selalu mengalami perkembangan atau perubahan dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut adalah program dan kegiatan di lingkup Bappelitbang yang akan dilaksanakan pada periode 2021-2023 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1

## Perubahan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018-2023

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>																		
1.	Meningkatnya Kualitas dan Implementasi Perencanaan Pembangunan			Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	45,37 Poin	45,58 Poin	10.310.599.812	45,79 Poin	9.205.491.698	46 Poin	9.529.082.850	46,21 Poin	10.085.940.442	46,42 poin	9.882.460.274		Bappelitbang	Kota Bandung
		1.1 Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan		Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	25,41 Poin	25,57 Poin	6.649.227.052	25,73 Poin	5.923.468.491	25,89 Poin	6.421.145.639	26,05 Poin	7.091.875.369	26,21 Poin	7.078.132.725		Bappelitbang	Kota Bandung
			Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	19,96 Poin	20,01 Poin	20,06 Poin		20,11 Poin		20,16 Poin		20,21 Poin				Bappelitbang	Kota Bandung	
			Urusan Perencanaan															
			1.1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata Penyusunan Dokumen Tepat Waktu	100%	100%	6.169.227.052	-	5.416.331.163	-	5.859.944.741	-	6.472.798.574	-	6.428.554.234		Bappelitbang	Kota Bandung
			Persentase Sasaran RPJMD yang di Cascade	100%	-	50%		66,67%		83,33%		100%						
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Perencanaan Kinerja Terukur	100%	-	50%		66,67%		83,33%		100%						
			Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023	1 dokumen	1 dokumen	609.345.456	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	500.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyusunan Rancangan RKPDP	Jumlah Dokumen RKPDP Kota Bandung	1 dokumen	1 dokumen	360.900.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	235.000.000	1 dokumen	325.671.160	1 dokumen	250.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 Kali	1 Kali	985.540.441	1 Kali	891.332.000	1 Kali	1.020.945.582	1 Kali	1.105.328.339	1 Kali	993.398.267	Bappelitbang	Kota Bandung	
			Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	1 Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kali	300.000.000	Bappelitbang	Kota Bandung	
			Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Kota Bandung	Jumlah Dokumen RKPD Perubahan Kota Bandung	1 dokumen	1 dokumen	169.962.500	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	155.000.000	1 dokumen	187.000.000	1 dokumen	170.000.000	Bappelitbang	Kota Bandung	
			Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	195.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	190.000.000	Bappelitbang	Kota Bandung	
			Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	140.000.000	1 dokumen	195.000.000	1 dokumen	170.000.000	Bappelitbang	Kota Bandung	
			Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan SDA	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	140.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	100.000.000	Bappelitbang	Kota Bandung	
			Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung	1 dokumen	1 dokumen	299.999.840	1 dokumen	274.999.800	1 dokumen	298.999.806	1 dokumen	359.299.787	1 dokumen	310.229.750	Bappelitbang	Kota Bandung	
			Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mikro Kota Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mikro Kota Bandung	1 dokumen	1 dokumen	199.999.665	1 dokumen	164.999.600	1 dokumen	188.999.595	1 dokumen	256.199.554	1 dokumen	206.819.510	Bappelitbang	Kota Bandung	

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Perencanaan Sumber daya Keuangan APBD dan Non APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber daya Keuangan APBD dan Non APBD	1 dokumen	1 dokumen	299.999.800	1 dokumen	274.999.763	1 dokumen	302.999.758	1 dokumen	334.299.734	1 dokumen	300.106.707		Bappelitbang	Kota Bandung
			Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen	1 dokumen	280.050.000	1 dokumen	230.000.000	1 dokumen	270.000.000	1 dokumen	295.000.000	1 dokumen	275.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Perencanaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	780.000.000	2 dokumen	700.000.000	2 dokumen	760.000.000	2 dokumen	830.000.000	2 dokumen	782.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	481.683.100	1 dokumen	430.000.000	1 dokumen	490.000.000	1 dokumen	575.000.000	1 dokumen	483.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyusunan Rancangan Perda Perubahan RTRW	Jumlah Dokumen Rancangan Perda Perubahan RTRW	-	1 Dokumen	296.793.100	-	-	-	-	-	-	-	-		Bappelitbang	Kota Bandung
			Sosialisasi Perda Perubahan RTRW	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perda Perubahan RTRW	-	-	-	3 Kali	375.000.000	-	-	-	-	-	-		Bappelitbang	Kota Bandung
			Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen Background Study	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	375.000.000	1 Dokumen	435.000.000	1 Dokumen	375.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Dan Infrastruktur terpadu	Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang Dan Infrastruktur terpadu	-	1 Sistem/ Aplikasi	349.453.150	-	-	-	-	-	-	-	-		Bappelitbang	Kota Bandung

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Updating Sistem Informasi Tata Ruang Dan Infrastruktur terpadu	Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang Dan Infrastruktur terpadu yang di update	-	-	-	1 Sistem/ Aplikasi	300.000.000	1 Sistem/ Aplikasi	350.000.000	1 Sistem/ Aplikasi	400.000.000	1 Sistem/ Aplikasi	375.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	265.000.000	1 Dokumen	215.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	265.000.000	1 Dokumen	215.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Perencanaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 Dokumen	1 Dokumen	205.500.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	188.000.000	1 Dokumen	245.000.000	1 Dokumen	218.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyusunan Masterplan Pendidikan	Jumlah Dokumen Masterplan Pendidikan	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyusunan Masterplan Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Masterplan Pengendalian Penduduk	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-		Bappelitbang	Kota Bandung
			<b>1.1.2 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>380.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>407.137.328</b>	<b>100 %</b>	<b>461.200.898</b>	<b>100 %</b>	<b>519.076.795</b>	<b>100 %</b>	<b>549.578.491</b>		<b>Bappelitbang</b>	<b>Kota Bandung</b>

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Jumlah Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	1 Kali	1 Kali	380.000.000	1 Kali	407.137.328	1 Kali	461.200.898	1 Kali	519.076.795	1 Kali	549.578.491	Bappelitbang	Kota Bandung	
		1.2 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan		Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	68%	72%	990.000.100	76%	824.360.360	80%	846.887.392	84%	913.899.239	88%	890.574.982	Bappelitbang	Kota Bandung	
			1.1.3 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti	100%	100%	430.000.000	100%	358.055.474	100%	367.839.941	100%	396.946.094	100%	386.815.357	Bappelitbang	Kota Bandung	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Triwulanan lingkup Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya	4 dokumen	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	89.000.000	4 dokumen	91.500.000	4 dokumen	98.000.000	4 dokumen	96.000.000	Bappelitbang	Kota Bandung	
			Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Triwulanan	4 dokumen	4 dokumen	130.000.000	4 dokumen	91.055.474	4 dokumen	93.339.941	4 dokumen	102.946.094	4 dokumen	98.815.357	Bappelitbang	Kota Bandung	

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Ekonomi	Jumlah PD lingkup Ekonomi yang dimonitoring dan dievaluasi Pelaksanaan APBDnya	4 dokumen	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	89.000.000	4 dokumen	91.500.000	4 dokumen	98.000.000	4 dokumen	96.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah PD lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dimonitoring dan dievaluasi Pelaksanaan APBDnya	4 dokumen	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	89.000.000	4 dokumen	91.500.000	4 dokumen	98.000.000	4 dokumen	96.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			<b>1.1.4 Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>560.000.100</b>	<b>100 %</b>	<b>466.304.886</b>	<b>100 %</b>	<b>479.047.451</b>	<b>100 %</b>	<b>516.953.145</b>	<b>100 %</b>	<b>503.759.625</b>		<b>Bappelitbang</b>	<b>Kota Bandung</b>
			Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data Perencanaan Pembangunan Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota	Jumlah Dokumen LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	460.000.100	1 Dokumen	366.304.886	1 Dokumen	379.047.451	1 Dokumen	416.953.145	2 Dokumen	403.759.625		Bappelitbang	Kota Bandung
		<b>1.3 Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Hasil Kajian yang direkomendasikan sebagai dasar Perumusan Kebijakan</b>	<b>75 %</b>	<b>100 %</b>	<b>2.671.372.660</b>	<b>100%</b>	<b>2.457.662.847</b>	<b>100%</b>	<b>2.261.049.819</b>	<b>100%</b>	<b>2.080.165.834</b>	<b>100%</b>	<b>1.913.752.567</b>		<b>Bappelitbang</b>	<b>Kota Bandung</b>

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>															
			1.2.1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang direkomendasikan sebagai dasar Perumusan Kebijakan	75 %	100 %	2.671.372.660	100 %	2.457.662.847	100 %	2.261.049.819	100 %	2.080.165.834	100 %	1.913.752.567		Bappelitbang	Kota Bandung
			Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	5 Dokumen	5 Dokumen	992.187.160	5 Dokumen	875.546.464	4 Dokumen	806.397.410	4 Dokumen	738.061.121	4 Dokumen	683.923.343		Bappelitbang	Kota Bandung
			Koordinasi Kelitbangan	Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan	4 Laporan	4 Laporan	116.327.900	5 Laporan	102.665.690	4 Laporan	98.756.705	4 Laporan	94.632.429	4 Laporan	89.815.378		Bappelitbang	Kota Bandung
			Kelitbangan Lingkup Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kelitbangan Lingkup Inovasi dan Teknologi	4 Dokumen	3 Dokumen	822.447.920	4 Dokumen	775.000.000	4 Dokumen	711.000.000	4 Dokumen	672.000.000	4 Dokumen	623.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Kelitbangan Lingkup Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Lingkup Sosial dan Pemerintahan	6 Dokumen	4 Dokumen	740.409.680	4 Dokumen	704.450.693	4 Dokumen	644.895.704	4 Dokumen	575.472.284	4 Dokumen	517.013.846		Bappelitbang	Kota Bandung
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang			Indeks Kepuasan Masyarakat	77,92 Poin	78,17 Poin	6.578.138.358	78,42 Poin	6.170.850.822	78,67 Poin	6.585.457.843	78,92 Poin	7.357.030.600	79,17 Poin	7.044.837.479		Bappelitbang	Kota Bandung
		2.1 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang		Indeks Kepuasan Masyarakat	77,92 Poin	78,17 Poin	6.578.138.358	78,42 Poin	6.170.850.822	78,67 Poin	6.585.457.843	78,92 Poin	7.357.030.600	79,17 Poin	7.044.837.479		Bappelitbang	Kota Bandung
			<b>Non Urusan</b>															
			2.1.1 Program Pelayanan Administrasi	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.319.900.550	100%	4.026.351.234	100%	4.136.378.051	100%	4.463.678.156	100%	4.349.757.522		Bappelitbang	Kota Bandung

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			<b>Perkantoran</b>															
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	44.880.000	12 Laporan	44.880.000	12 Laporan	44.880.000	12 Laporan	44.880.000	12 Laporan	44.880.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000	12 Laporan	166.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	210.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Laporan	12 Laporan	251.280.354	12 Laporan	231.246.527	12 Laporan	247.340.241	12 Laporan	251.280.004	12 Laporan	251.280.103		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	12 Laporan	247.056.000	12 Laporan	247.056.000	12 Laporan	247.056.000	12 Laporan	247.056.000	12 Laporan	247.056.000		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	25.347.366	12 Laporan	27.882.103	12 Laporan	30.670.313	12 Laporan	33.737.074	12 Laporan	37.531.079		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	12 laporan	154.359.960	12 laporan	129.795.956	12 laporan	152.775.552	12 laporan	180.453.107	12 laporan	175.998.417		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 laporan	12 laporan	124.877.500	12 laporan	127.375.101	12 laporan	129.922.603	12 laporan	142.521.055	12 laporan	135.171.476		Bappelitbang	Kota Bandung
			Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan minuman	12 laporan	12 laporan	260.161.770	12 laporan	210.177.947	12 laporan	221.795.742	12 laporan	276.275.316	12 laporan	245.902.847		Bappelitbang	Kota Bandung
			Rapat-rapat koordinasi dan	Jumlah Laporan Rapat-rapat	12	12	850.000.000	12	700.000.000	12		12		12			Bappelitbang	Kota Bandung

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	laporan	laporan		laporan		laporan	750.000.000	laporan	895.538.000	laporan	860.000.000			
			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran	12 laporan	12 laporan	2.141.937.600	12 laporan	2.141.937.600	12 laporan	2.141.937.600	12 laporan	2.141.937.600	12 laporan	2.141.937.600		Bappelitbang	Kota Bandung
			<b>2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>2.038.787.809</b>	<b>100 %</b>	<b>1.694.475.442</b>	<b>100 %</b>	<b>1.981.215.494</b>	<b>100 %</b>	<b>2.190.507.239</b>	<b>100 %</b>	<b>2.202.466.968</b>		Bappelitbang	Kota Bandung
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	1 Paket	287.000.000	1 Paket	400.000.000	-	-		Bappelitbang	Kota Bandung
			Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Perlengkapan Peralatan Aparatur	1 Paket	1 Paket	118.715.264	1 Paket	95.417.817	1 Paket	95.217.817	1 Paket	95.217.614	1 Paket	95.213.594		Bappelitbang	Kota Bandung
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bappelitbang	12 Laporan	12 Laporan	440.316.000	12 Laporan	184.347.600	12 Laporan	184.347.600	12 Laporan	184.647.600	12 Laporan	396.610.680		Bappelitbang	Kota Bandung
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara	38 Unit	40 Unit	1.300.314.048	45 Unit	1.105.587.275	45 Unit	1.095.527.327	45 Unit	1.351.405.275	45 Unit	1.551.405.895		Bappelitbang	Kota Bandung
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Laporan	12 Laporan	162.942.500	12 Laporan	109.236.750	12 Laporan	109.236.750	12 Laporan	109.236.750	12 Laporan	109.236.799		Bappelitbang	Kota Bandung

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	Jumlah Laporan Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair	12 Laporan	12 Laporan	16.499.997	12 Laporan	50.000.000		Bappelitbang	Kota Bandung						
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	1 Paket	-	-	1 Paket	149.886.000	1 Paket	159.886.000	-	-	-	-		Bappelitbang	Kota Bandung
			<b>2.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Aparatur</b>	<b>100 %</b>	-	-	<b>100 %</b>	<b>267.290.951</b>	<b>100 %</b>	<b>280.137.612</b>	<b>100 %</b>	<b>301.264.227</b>	<b>100 %</b>	<b>295.202.221</b>		<b>Bappelitbang</b>	<b>Kota Bandung</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas)	95 stel	-	-	95 stel	97.925.000		Bappelitbang	Kota Bandung						
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus	95 stel	-	-	285 stel	169.365.951	285 stel	182.212.612	285 stel	203.339.227	285 stel	197.277.221		Bappelitbang	Kota Bandung
			<b>2.1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>219.450.000</b>	<b>100 %</b>	<b>182.733.195</b>	<b>100 %</b>	<b>187.726.686</b>	<b>100 %</b>	<b>401.580.978</b>	<b>100 %</b>	<b>197.410.768</b>		<b>Bappelitbang</b>	<b>Kota Bandung</b>
			Pembinaan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah pegawai yang mengikuti BinteK Peningkatan Kapasitas	80 orang	95 orang	219.450.000	95 orang	182.733.195	95 orang	187.726.686	95 orang	401.580.978	95 orang	197.410.768		Bappelitbang	Kota Bandung

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
<b>SETELAH PERUBAHAN</b>																		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi			Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran		-	-	-	-									
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah		Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja		-	-	-	-	44,05 Poin		44,12 Poin		44,20 Poin				
				Persentase Hasil Kajian yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan		-	-	-	-	100%		100%		100%				
			Urusan Perencanaan															
			1.1.1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran RPJMD yang di Breakdown (Cascading)		-	-	-	-	66.67%	2.392.523.800	83.33%	2.543.403.000	100%	2.670.573.150			
				Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	100%		100%		100%				
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		-	-	-	-	7 Dokumen	1.530.364.000		2.015.172.000		2.115.930.600			

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Pendanaan Pembangunan Daerah					1 Dokumen	202.450.000	1 Dokumen	264.618.000	1 Dokumen	277.848.900				
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD					1 Laporan	76.740.000	1 Laporan	245.000.000	1 Laporan	257.250.000				
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Kota					2 Dokumen	724.885.000	1 Laporan	843.828.000	1 Laporan	886.019.400				
			Koodinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD					4 Dokumen	526.289.000	3 Dokumen	661.726.000	3 Dokumen	694.812.300				
			<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan</b>					1 Dokumen	361.296.000	1 Dokumen	248.231.000	1 Dokumen	260.642.550				
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Daerah					1 Dokumen	361.296.000	1 Dokumen	248.231.000	1 Dokumen	260.642.550				
				Jumlah Laporan Hasil Integrasi Sistem														

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah					5 Dokumen	500.863.800	5 Dokumen	280.000.000	5 Dokumen	294.000.000				
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah					4 Dokumen	146.710.000	5 Dokumen	280.000.000	5 Dokumen	294.000.000				
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah					1 Dokumen	354.153.800	-	-	-	-				
			1.1.2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerjanya terukur					66.67%		83.33%		100%					
				Persentase Rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti					100%	5.013.134.912	100%	4.008.241.777	100%	4.628.653.866				
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Bidang Pemerintahan dan					17 Dokumen	584.263.550	15 Dokumen	700.000.000	15 Dokumen	735.000.000				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Pembangunan Manusia														
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan					3 Dokumen	89.112.500	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	210.000.000				
			Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan					4 Dokumen	47.998.250	4 Dokumen	134.000.000	4 Dokumen	140.700.000				
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Adaptif Berbasis Kewilayahan Tangguh	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia					4 Dokumen	179.989.800	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	105.000.000				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Keselarasan Perencanaan Kinerjanya Lingkup Bidang Pembangunan Manusia					2 Dokumen	228.172.000	-	-	-	-				
				Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi TKPK														
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					4 Dokumen	38.991.000	4 Dokumen	66.000.000	4 Dokumen	69.300.000				
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam					12 Dokumen	1.710.363.862	14 Dokumen	1.838.799.725	14 Dokumen	1.930.739.711				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					4 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	210.000.000				
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian					2 Dokumen	848.273.420	2 Dokumen	838.799.725	2 Dokumen	880.739.711				
			Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian					4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	210.000.000				
				Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian														
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam					4 Dokumen	0	-	-	-	-				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam					1 Dokumen	263.797.362	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	420.000.000				
			Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sumber Daya Manusia					4 Dokumen	498.293.080	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	210.000.000				
				Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sumber Daya Alam														
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>					<b>16 Dokumen</b>	<b>2.718.507.500</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>1.869.442.052</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>1.962.914.155</b>				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Keselarasan Perencanaan Kinerjanya Lingkup Bidang Infrastruktur					7 Dokumen	601.579.340	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	262.500.000				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur														
			Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur					6 Dokumen	528.948.200	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	315.000.000				
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur					1 Dokumen	558.144.000	1 Dokumen	644.442.052	1 Dokumen	676.664.155				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi keselarasan perencanaan kerjanya lingkup Bidang Kewilayahan					5 Dokumen	622.403.600	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	210.000.000				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan														
			Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan					4 Dokumen	39.125.000	4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	78.750.000				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Daerah Bidang Kewilayahan	Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan														
				Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan														
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan				1 Dokumen	368.307.360	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	420.000.000					
			<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>															
			1.2.1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan				100%	955.599.130	100%	2.475.000.000	100%	2.598.750.000					
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				8 Dokumen	280.460.950	-	-	-	-					
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				3 Dokumen	167.982.000	-	-	-	-					

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Umum															
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan					5 Dokumen	112.478.950	-	-	-	-				
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>					<b>2 Dokumen</b>	<b>180.144.300</b>								
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					1 Dokumen	0	-	-	-	-				
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan					1 Dokumen	180.144.300	3 Dokumen	600.000.000	3 Dokumen	630.000.000				
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan					-	-	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	236.250.000				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman					-	-	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	183.750.000				
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan komunikasi dan informatika					-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000				
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>					-	-	<b>3 Dokumen</b>	<b>600.000.000</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>630.000.000</b>				
			Penelitian dan Pengembangan Aspek – Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Aspek – Aspek Sosial					-	-	1 Dokumen	233.013.550	1 Dokumen	244.664.228				
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					-	-	1 Dokumen	140.873.600	1 Dokumen	147.917.280				
			Penelitian dan Pengembangan Pendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					-	-	1 Dokumen	226.112.850	1 Dokumen	237.418.492				
			<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>					<b>3 Dokumen</b>	<b>494.993.880</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>675.000.000</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>708.750.000</b>				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					2 Dokumen	371.377.880	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	472.500.000				
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan					1 Dokumen	123.616.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	236.250.000				
		Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik (Minimal 83)					83.00	24.956.463.188	84.00	25.551.386.495	85.00	28.927.253.923				
			<b>Penunjang Urusan</b>															
			2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran					100%	24.956.463.188	100%	25.551.386.495	100%	28.927.253.923				
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan					8 Dokumen	98.147.309	9 Dokumen	213.682.250	9 Dokumen	224.366.363				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah					3 Dokumen	98.147.309	4 Dokumen	113.682.250	4 Dokumen	224.366.363				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah					5 Dokumen	0	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	105.000.000				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	17.877.254.304	100%	17.639.178.557	100%	20.514.615.585				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu					12 Laporan	17.877.254.304	12 Laporan	17.639.178.557	12 Laporan	20.514.615.585				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	2.541.911.680	100%	2.514.411.680	100%	2.640.132.264				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2 Jasa/ Bulan	387.627.680	2 Jasa	360.127.680	2 Jasa	378.134.064				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Jasa/ Bulan	110.000.000	1 Jasa	110.000.000	1 Jasa	115.500.000				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5 Jasa/ 12 Bulan	2.044.284.000	4 Jasa	2.044.284.000	4 Jasa	2.146.498.200				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%	1.078.439.667	100%	1.392.227.972	100%	1.461.839.371				
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					4 Laporan	135.421.000	4 Laporan	113.995.750	4 Laporan	119.695.538				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan					1 Jasa/ Bulan	71.858.400	12 Bulan	43.224.000	12 Bulan	45.385.200				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur					100%	399.544.280	100%	733.976.200	100%	770.675.010				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman					100%	104.873.580	100%	154.986.080	100%	162.735.384				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100%	187.404.000	4 Laporan	159.451.600	4 Laporan	167.424.180				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					100%	144.185.597	12 Laporan	145.054.492	12 Laporan	152.307.217				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					12 Bulan	35.152.810	12 Laporan	41.539.850	12 Laporan	43.616.843				
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>					<b>100%</b>	<b>1.599.086.910</b>	<b>100%</b>	<b>1.726.899.020</b>	<b>100%</b>	<b>1.813.243.971</b>				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Daerah	Pemerintahan Daerah														
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara					100%	1.226.327.710	100%	1.226.234.460	100%	1.287.546.183				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-	-	4 Laporan	132.660.000	4 Laporan	139.293.000				
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5 Dokumen	110.352.000	12 Laporan	28.314.000	12 Laporan	29.729.700				
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara					3 Dokumen	262.407.200	1 Unit	339.690.560	1 Unit	356.675.088				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7 Dokumen	135.850.000	3 Laporan	1.268.307.978	1 Laporan	1.331.723.377				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					1 Laporan	135.850.000	1 Laporan	122.413.500	1 Laporan	128.354.175				
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan					3 Dokumen	492.655.000	1 Laporan	400.084.478	1 Laporan	420.088.702				
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Diklat yang Dilaksanakan					-	-	100%	363.000.000	100%	381.150.000				
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan					-	-	2 Laporan	400.084.478	2 Laporan	420.088.702				
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>2 Laporan</b>	<b>640.463.318</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>779.404.560</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>818.374.788</b>				
			Pengadaan Mebel	Laporan Pengadaan Mebel					-	-	1 Laporan	86.121.640	1 Laporan	90.427.722				

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-	-	1 Laporan	604.992.850	1 Laporan	635.242.493				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Laporan	605.548.548	1 Laporan	88.290.070	1 Laporan	92.704.574				
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Akhir Tahun Anggaran					1 Laporan	34.914.770	-	-	-	-				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbang Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Bappelitbang Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbang yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, Bappelitbang berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0 (2018)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
<b>A. Sebelum Perubahan</b>									
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	25,41 Poin	25,57 Poin	25,73 Poin	25.50 Poin	26.05 Poin	26.21 Poin	26.21 Poin
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	19,96 Poin	20,01 Poin	20,06 Poin	19.50 Poin	20.16 Poin	20.21 Poin	20.21 Poin
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	68%	72%	76%	78%	84%	88%	88%
3.	Meningkatnya Pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,92 Poin	78,17 Poin	78,42 Poin	78.67 Poin	78.92 Poin	79.17 Poin	79.17 Poin
<b>B. Setelah Perubahan</b>									
1.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	-	-	-	44,05 Poin	44,12 Poin	44,2 Poin	44,2 Poin
		Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	-	-	-	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik	-	-	-	83.00 Poin	84 Poin	85 Poin	85 Poin

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang**  
**Perencanaan Pembangunan**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0 (2018)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Dokumen	1	1	-	1	-	-	2
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	2	2	2	2	2	2	12
4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Dokumen	1	1	-	-	-	-	1
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 berfungsi sebagai pedoman dan tujuan ASN Bappelitbang Kota Bandung dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini berisi penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappelitbang yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Perubahan Rencana Strategis Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 akan menjadi pedoman dan landasan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappelitbang Kota Bandung sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih.

Bandung, Desember 2021

**KEPALA BAPPELITBANG  
KOTA BANDUNG,**

**TTD**

**ANTON SUNARWIBOWO, S.T., M.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690810 199703 1 003



